

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi telah mempercepat pergerakan manusia, barang, dan informasi lintas negara. Dinamika ini membawa dampak signifikan terhadap arsitektur keamanan internasional, terutama dalam konteks ancaman non-tradisional seperti kejahatan lintas negara. Mobilitas tinggi membuka celah hukum dan pengawasan yang kerap dimanfaatkan oleh aktor non-negara. Negara-negara pun dituntut untuk membangun respons yang lebih kolaboratif dan adaptif (Albanese, 2012; Weiss & Daws, 2022). Mekanisme konvensional sering kali terbukti tidak memadai menghadapi kompleksitas tersebut.

Kelompok kriminal lintas negara memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan perbedaan regulasi antarnegara untuk memperluas operasi mereka. Mereka membentuk struktur kerja yang terorganisasi dengan pembagian tugas, teknologi komunikasi canggih, serta jaringan yang tersebar di banyak wilayah. Keberadaan mereka sulit dilacak karena menyatu dengan aktivitas legal dan kerap melibatkan aktor lokal. Ketiadaan batas yurisdiksi universal memperbesar peluang lolos dari penindakan hukum (Reichel & Randa, 2018; Locke, 2021). Fenomena ini menantang otoritas negara dalam menjaga kedaulatannya.

Di berbagai kasus, jaringan kriminal tidak hanya beroperasi dalam kerangka kekerasan atau pemaksaan, tetapi juga menjalin relasi informal dengan masyarakat lokal. Hubungan sosial ini menjadi kanal penting dalam proses

rekrutmen dan pelaksanaan aktivitas ilegal. Pelaku sering memanfaatkan ikatan kekerabatan, jaringan komunitas, atau tokoh informal untuk membangun kepercayaan. Bentuk relasi ini membuat proses ilegalisasi tersamar di balik hubungan yang dianggap wajar (Shehdula & Karamuço, 2024; Buscaglia, 2013). Proses demikian memperkuat daya tahan jaringan terhadap intervensi eksternal.

Asia Tenggara merupakan wilayah yang rentan terhadap aktivitas kejahatan lintas negara karena letaknya yang strategis dan tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan ribuan titik perlintasan laut dan darat, menghadapi tantangan besar dalam pengawasan wilayahnya. Kota Batam menjadi salah satu titik rawan karena letaknya yang dekat dengan Singapura dan Malaysia, serta tingginya mobilitas manusia (Karim & Yusof, 2022). Di kota ini, kontrol administratif belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah perlintasan informal.

Keterbatasan koordinasi antara lembaga pusat dan daerah, serta lemahnya integrasi sistem data lintas sektor, memperburuk situasi pengawasan. Dalam konteks migrasi, jaringan pelaku mampu mengeksploitasi celah regulasi dan minimnya deteksi dini terhadap proses rekrutmen. Batam menjadi titik strategis dalam pengiriman tenaga kerja ilegal ke sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Kamboja (UNODC, 2014; BP2MI, 2024). Perjalanan mereka tidak tercatat secara resmi, sehingga sulit dipantau keberadaannya dan rentan terhadap eksploitasi.

Perekrutan tenaga kerja ilegal dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari penyebaran informasi melalui media sosial hingga ajakan langsung dari orang yang dikenali korban. Informasi yang diberikan kerap menyesatkan, seperti jenis pekerjaan, lokasi penempatan, hingga besar gaji yang dijanjikan. Banyak korban tidak menyadari bahwa mereka akan ditempatkan di sektor kerja yang melanggar hukum atau hak asasi manusia. Kurangnya akses terhadap informasi dan lemahnya literasi digital turut menjadi faktor kerentanan (Shehdula & Karamuço, 2024).

Jaringan pelaku membagi peran secara fungsional untuk memperlancar operasi. Ada yang bertugas merekrut, mengatur keberangkatan, memfasilitasi dokumen, dan menghubungkan dengan pihak di luar negeri. Sistem ini bersifat fleksibel, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan situasi di lapangan. Hal ini membuat upaya pemutusan jaringan menjadi tantangan tersendiri karena struktur organisasi tidak selalu bersifat hierarkis atau tetap. Selain itu, banyak aktor bekerja secara parsial dan tidak selalu menyadari peran mereka dalam keseluruhan kejahatan.

Karakteristik hubungan antara pelaku dan korban sering kali menunjukkan adanya kedekatan sosial. Perekrut tidak jarang berasal dari lingkungan sekitar korban, sehingga menciptakan rasa percaya. Dengan memanfaatkan kedekatan tersebut, pelaku mampu meyakinkan korban tanpa menimbulkan kecurigaan. Proses ini memperkuat aspek psikologis dalam eksploitasi dan membuat korban lebih sulit untuk menolak tawaran yang diajukan. Ketika korban menyadari situasi

sebenarnya, mereka sering kali sudah berada dalam posisi yang sulit untuk kembali (Shehdula & Karamuço, 2024).

Di Batam, keterlibatan jaringan lokal memudahkan proses pengurusan dokumen palsu dan pengaturan jalur keberangkatan non-prosedural. Minimnya pengawasan di pelabuhan kecil atau titik perbatasan informal mempercepat pergerakan. Banyak keberangkatan dilakukan tanpa pemeriksaan imigrasi, membuat data perlintasan tenaga kerja tidak akurat. Situasi ini menghambat perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri. Selain itu, keterbatasan data juga membuat proses pelacakan dan repatriasi korban menjadi lebih sulit.

Sesampainya di negara tujuan, tenaga kerja ilegal kerap dihadapkan pada kondisi kerja yang tidak sesuai dengan janji awal. Mereka bisa mengalami eksploitasi dalam bentuk jam kerja berlebihan, pemotongan gaji, penyitaan dokumen, dan ancaman kekerasan. Kondisi kerja seperti ini tidak mudah dideteksi karena korban tidak memiliki akses hukum atau perlindungan sosial. Banyak dari mereka berada di lokasi tertutup atau sangat terkontrol. Ketergantungan ekonomi terhadap pelaku membuat korban enggan atau takut melapor.

Teknologi turut berperan dalam memperkuat kontrol terhadap korban. Pelaku menggunakan kamera pengawas, aplikasi pelacak, dan sistem komunikasi tertutup untuk memantau aktivitas tenaga kerja yang direkrut secara ilegal. Ini membuat korban sulit mencari bantuan atau berkomunikasi dengan pihak luar. Situasi ini memperburuk posisi korban yang tidak memiliki akses terhadap layanan kedutaan atau lembaga perlindungan (Li et al., 2024). Dalam konteks ini, teknologi tidak lagi menjadi alat pemberdayaan, melainkan instrumen dominasi.

Di Kamboja, sektor kerja yang ditempati sebagian besar pekerja migran ilegal dari Indonesia adalah industri digital seperti perjudian daring dan penipuan berbasis daring. Meskipun kegiatan ini legal di negara tujuan, proses rekrutmen dan pengiriman dari Indonesia tidak sesuai hukum karena sektor tersebut tidak tercantum dalam skema migrasi kerja resmi. Akibatnya, proses migrasi berlangsung secara diam-diam dan tidak mendapatkan pengawasan negara (Fauziah & Putri, 2025). Dalam kondisi tersebut, calo dan sindikat mengambil alih peran negara.

Menurut data BP2MI, sebagian besar pekerja migran yang diberangkatkan secara non-prosedural berasal dari wilayah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mereka terdorong oleh janji pendapatan besar dan peluang kerja di luar negeri yang tampak lebih menjanjikan. Situasi ini dimanfaatkan oleh jaringan untuk terus merekrut tenaga kerja baru. Tanpa edukasi dan penyadaran yang sistematis, masyarakat akan terus menjadi sasaran empuk dalam jaringan ini (BP2MI, 2024; KumparanNews, 2024). Informasi menjadi alat utama dalam pertarungan antara pelaku dan korban.

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi migrasi ilegal telah berkembang dari pendekatan represif ke arah perlindungan dan pencegahan. Namun, dalam praktiknya, implementasi masih dihadapkan pada persoalan koordinasi lintas lembaga dan keterbatasan sumber daya. Upaya penyelidikan, repatriasi, dan rehabilitasi korban sering berlangsung lambat dan parsial. Keterlibatan lembaga non-pemerintah menjadi penting untuk mengisi kekosongan ini. Kolaborasi multistakeholder perlu diperkuat secara strategis.

Respons hukum terhadap kejahatan lintas negara ini juga belum sepenuhnya adaptif. Banyak regulasi yang tidak mengakomodasi perkembangan modus operandi jaringan saat ini. Selain itu, hukum pidana nasional masih kesulitan menjangkau pelaku lintas batas yang berada di yurisdiksi berbeda. Kerja sama antarnegara melalui mekanisme bilateral dan multilateral menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa itu, penegakan hukum akan selalu tertinggal dari realitas di lapangan.

Tantangan besar lainnya adalah mengintegrasikan kebijakan perlindungan pekerja migran dengan isu pemberantasan kejahatan transnasional. Selama ini, dua isu tersebut cenderung dipisahkan secara administratif dan institusional. Padahal, dalam konteks migrasi ilegal, keduanya sangat berkaitan. Tenaga kerja yang diberangkatkan secara ilegal hampir selalu berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hukum. Kebijakan yang parsial hanya akan menghasilkan solusi jangka pendek.

Pentingnya kajian mendalam terhadap dinamika lokal dalam rantai migrasi ilegal belum sepenuhnya menjadi perhatian dalam studi kebijakan. Padahal, setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang unik. Batam sebagai salah satu titik transit utama menawarkan konteks yang kaya untuk ditelaah. Dengan pendekatan yang kontekstual, kebijakan dapat dirancang lebih tepat sasaran dan berdampak jangka panjang. Data lokal pun menjadi landasan yang penting dalam perumusan intervensi yang berbasis bukti.

Tabel 1. 1 Hasil Wawancara dengan Informan

No	Inisial	Situs Judi Online	Modus	Pola Perekrutan
1	DT	QGOLE	Tertarik mencari pengalaman baru dan tergiur karena pekerjaan ini sedang marak dibicarakan.	Diperkenalkan oleh teman dekat yang sudah lebih dahulu bekerja di Kamboja.
2	SG	SULTANTOGEL88	Penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut sistem kerja di luar negeri.	Menemukan lowongan kerja melalui media sosial (Facebook), kemudian dihubungkan oleh teman.
3	AL	CELANGWIN	Ingin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan UMR di Indonesia.	Mendengar kabar dari berita dan temannya yang sudah bekerja di sana, lalu menawarkan diri.
4	FH	CPG TOTO	Merasa peluang kerja lebih luas dan tawaran gaji lebih besar dibandingkan pekerjaan domestik.	Melamar melalui unggahan di Facebook dan diarahkan oleh perekrut.
5	MK	HOKI88BOS	Tergoda oleh cerita positif dari mantan pekerja dan iming-iming gaji tinggi.	Diarahkan oleh Teman yang dikenalnya lewat grup Telegram rekrutmen.

Sumber: Wawancara peneliti dengan ex-PMI dan PMI di Kamboja, 2024.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap lima informan laki-laki yang pernah direkrut secara ilegal dan dikirim ke Kamboja untuk bekerja di sektor digital ilegal. Proses rekrutmen mereka

mencerminkan keterlibatan berbagai aktor, mulai dari perekrut lokal hingga pengendali di luar negeri, yang beroperasi dalam jaringan lintas batas negara. Data tersebut disusun dalam bentuk tabel untuk mengidentifikasi pola rekrutmen, jalur keberangkatan, serta bentuk eksploitasi yang terjadi. Informasi ini memberikan gambaran rinci tentang dinamika operasional kelompok kejahatan terorganisir dan menjadi dasar dalam menganalisis sistem kerja jaringan tersebut sepanjang 2018–2025.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini mencakup dua hal utama, yaitu:

1. ★ Bagaimana dinamika modus operandi rekrutmen pekerja migran secara ilegal oleh kelompok kejahatan terorganisir dari Batam ke Kamboja dalam kurun waktu 2018 hingga 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dinamika modus operandi kelompok kejahatan terorganisir dalam merekrut dan mengirim pekerja migran secara ilegal dari Batam ke Kamboja sepanjang tahun 2018 hingga 2025. Fokus utama diarahkan pada identifikasi aktor yang terlibat, pola operasional rekrutmen yang dijalankan, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memungkinkan praktik ini berlangsung. Selain itu, penelitian

ini juga mengevaluasi respons negara, aparat penegak hukum, serta aktor non-negara terhadap keberadaan jaringan kejahatan lintas negara tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman akademik dalam kajian hubungan internasional, sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia dan pencegahan aktivitas kriminal lintas negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam isu keamanan non-tradisional yang melibatkan aktor non-negara dan kejahatan lintas negara. Dengan mengkaji dinamika modus operandi kejahatan terorganisir dalam konteks migrasi ilegal, studi ini memberikan wawasan konseptual mengenai bagaimana jaringan kriminal lintas batas membentuk struktur operasional yang kompleks dan transnasional. Temuan dari penelitian ini juga dapat memperkuat pemahaman terhadap peran celah kelembagaan negara dan interaksi antara tatanan domestik dan global dalam memfasilitasi aktivitas kejahatan terorganisir. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya perspektif terhadap bentuk-bentuk ancaman kontemporer yang tidak berasal dari aktor negara, namun mampu mengganggu stabilitas regional dan tata kelola internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun strategi penanggulangan kejahatan lintas negara, khususnya yang menyangkut sektor migrasi tenaga kerja. Informasi mengenai pola rekrutmen, struktur jaringan, dan titik rawan operasional dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah seperti BP2MI, Imigrasi, aparat penegak hukum, serta otoritas pelabuhan dalam memperkuat deteksi dini dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi organisasi masyarakat sipil dalam merancang program advokasi dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko migrasi ilegal dan potensi eksploitasi tenaga kerja. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman akademis, tetapi juga relevansi langsung terhadap upaya pencegahan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

